



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PANITIA SELEKSI

Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan 12770, Telp./Faks. (021) 7981088
www.bnp2tki.go.id

12 Desember 2017

Nomor : B.555 / PANSEL / XII / 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : *Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di
Lingkungan Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Para Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia.

di

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), akan diselenggarakan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang akan diisi melalui Seleksi Terbuka adalah :

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I/a)

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Perlindungan

B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/a)

1. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi
2. Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan seleksi dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. Informasi tentang ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam lampiran surat ini dan melalui alamat website: seleksijpt.bnp2tki.go.id.

Demikian, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Panitia Seleksi

Hermono

NIP. 19600119 198603 1 001

Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
- ④. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
14. Kementerian Kesehatan
15. Kementerian Sosial
16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17. Kementerian Ketenagakerjaan
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Perdagangan
20. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21. Kementerian Perhubungan
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika
23. Kementerian Pertanian
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Pariwisata
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Sekretariat Kabinet

Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Badan Standardisasi Nasional
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Badan Pusat Statistik
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10. Badan Informasi Geospasial
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13. Badan Kepegawaian Negara
14. Badan Intelijen Negara
15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
16. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
17. Badan Narkotika Nasional
18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
19. Badan SAR Nasional
20. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
21. Badan Ekonomi Kreatif
22. Lembaga Administrasi Negara
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Lembaga Sandi Negara
25. Lembaga Ketahanan Nasional
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
27. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

Ketua Panitia Seleksi



Hermono

NIP. 19600119 198603 1 001